

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses westernisasi di Jepang dipahami sebagai titik balik sejarah yang berlangsung secara intensif sejak periode Meiji (1868–1912), ketika Jepang secara sadar membuka diri terhadap pengaruh Barat setelah berakhirnya kebijakan isolasi (*sakoku*) pada era Tokugawa. Westernisasi pada periode ini tidak hanya mencakup adopsi teknologi, sistem pemerintahan, dan militer Barat, tetapi juga melibatkan transformasi nilai sosial dan budaya yang mendasar. Persoalan upaya menjadikan Jepang setara dengan “ras kulit putih” juga tidak dapat dilepaskan dari konteks wacana rasial global pada akhir abad ke-19. Di mana kunjungan misi Iwakura ke Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1871–1873 menjadi salah satu kontak awal Jepang dengan dunia Barat setelah Restorasi Meiji. Misi ini bertujuan mempelajari sistem pemerintahan dan institusi Barat sebagai dasar pembangunan negara modern. Dalam perjalanannya, para peserta misi menyaksikan langsung ekspansi imperialis negara-negara Barat, yang memicu perdebatan mengenai arah masa depan Jepang, antara menjadi negara imperium atau negara netral. Perdebatan ini berlanjut hingga periode Taishō, seiring Jepang mulai memperluas wilayahnya ke Hokkaidō, Ryūkyū, Taiwan, Sakhalin, dan Korea.

Meskipun telah mencapai apa yang disebut sebagai *standard of civilization*, Jepang tetap dipandang sebagai bagian dari “ras berwarna” oleh Barat. Kondisi ini mendorong Jepang untuk menegosiasikan posisinya, dengan mendekatkan diri pada

Eropa dan Amerika Serikat, sekaligus menjauhkan identitasnya dari bangsa-bangsa Asia lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ayelet Zohar (2020), bahwa modernitas Jepang tidak berkembang melalui penolakan total terhadap tradisi, melainkan melalui proses selektif yang menempatkan Jepang dalam posisi ambivalen antara keinginan untuk menjadi “modern” menurut standar Barat dan upaya mempertahankan identitas kulturalnya sendiri. Kondisi ini menjadikan westernisasi Jepang sebagai proses yang kompleks dan kontradiktif, di mana nilai-nilai Barat diinternalisasi sekaligus dinegosiasikan dalam konteks sosial Jepang.

Sebelum masuknya westernisasi pada periode Meiji, struktur keluarga dan pernikahan di Jepang terutama diatur oleh sistem keluarga *ie* yang menekankan kesinambungan garis keturunan, hierarki, dan kewajiban sosial. Dalam sistem ini, pernikahan dipandang sebagai institusi sosial dan ekonomi, bukan semata-mata pilihan individual, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan keluarga dan menjalankan kewajiban terhadap leluhur. Peran gender diatur secara tegas, di mana laki-laki berperan sebagai kepala keluarga sementara perempuan ditempatkan dalam ranah domestik dan reproduktif. Norma-norma ini menciptakan stabilitas sosial dalam konteks masyarakat agraris dan feodal, namun sekaligus membatasi otonomi individu, khususnya perempuan, dalam menentukan pilihan hidup.

Pada era *pra-western* yakni periode Tokugawa, tatanan sosial dan keluarga dibentuk oleh seperangkat norma moral yang menekankan hierarki, ketaatan, dan keberlanjutan garis keturunan. Norma-norma tersebut dilegitimasi tidak hanya melalui praktik sosial, tetapi juga melalui wacana terkhususnya bagi Perempuan. Pada periode tersebut, *Onna Daigaku* muncul sebagai salah satu teks yang

merepresentasikan pandangan normatif mengenai peran dan kewajiban perempuan dalam keluarga Jepang *pra-western*, yang berakar pada ajaran Konfusian. “Onna Daigaku” merupakan buku yang ditulis oleh seorang moralis abad ke-17 bernama Ekken Kaibara, yang berargumen bahwa kewajiban perempuan adalah menghormati suami dan mertuanya (Kaibara & Takaishi 1910, 8-10). Salah satu pernyataan yang terkenal adalah “*Yomeshite sannen ko nakiwa saru*”, yang berarti seorang wanita yang tidak mempunyai anak harus meninggalkan suaminya setelah tiga tahun menikah. Teks ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam struktur keluarga dengan menekankan kepatuhan serta fungsi domestik dan reproduktif sebagai dasar nilai perempuan. Sistem ini diterapkan dengan adanya kepercayaan bahwa ketidaksuburan dianggap sebagai tidak adanya keturunan untuk melakukan upacara ritual bagi anggota keluarga yang meninggal sehingga hal ini dianggap telah melanggar norma berbakti kepada orang tua.

Pada periode yang sama, wanita Jepang seringkali disalahkan atas ketidaksuburan suami. Bahkan untuk mendapatkan seorang anak laki-laki, suami diizinkan untuk memiliki gundik. Dalam budaya Edo, terdapat kecenderungan mengkomodifikasi perempuan-perempuan lajang melalui praktek prostitusi, baik publik maupun swasta (Imai 2002). Terlihat dalam sastra *Ukiyoe*, citra perempuan kerap dijadikan sebagai objek hasrat seksual dari para laki-laki dengan menekankan gambar pada lekuk tubuh perempuan. Perempuan yang bekerja seperti menjual bunga, teh, buku, pembantu rumah tangga, dan bahkan perawat seringkali digambarkan secara sensual dalam *Ukiyoe art*. Fenomena dalam budaya Edo ini

menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sehingga memarginalkan perempuan dalam struktur sosial.

Berakhirnya kepemimpinan Edo Tokugawa tentu menjadikan era Meiji sebagai awal mula terjadinya pergeseran budaya Jepang yang sangat tradisional. Pada periode ini, Jepang yang semula menutup diri dari pengaruh asing dan melarang segala perdagangan dengan negara-negara Barat, kini telah membuka pintunya. Era Meiji menjadi bukti peningkatan modernisasi dan nasionalisasi Jepang. Pada era ini juga, kapitalisme industri terus berkembang. Pergeseran ekonomi-politik ini berdampak pada nilai dan perilaku pasangan di Jepang baik di kota maupun desa. Di kota, banyak bermunculan laki-laki dengan pekerjaan tetap menopang keluarganya dan para istri mengikuti dengan berperan sebagai ibu rumah tangga yang baik dan manajer rumah tangga yang baik atau dikenal dengan sebutan *ryosai kenbo*.

Ideologi mengenai *ryosai kenbo* (*good wives, wise mother*) kemudian menjadi fokus utama pendidikan tinggi bagi perempuan Jepang. Slogan berisi “perempuan adalah kunci rumah tangga” menekankan bahwa menjadi ibu dan menikah menjadi hal yang harus diterapkan dalam kehidupan perempuan sesuai dengan *Onna Daigaku*. Pada periode yang sama, terdapat gerakan-gerakan untuk membebaskan perempuan dari batasan struktural *ie* dan konfusianisme, salah satunya adalah majalah *Seito* yang diterbitkan oleh perempuan terpelajar Jepang yang tertarik dengan kelahiran berencana (KB) dan berusaha untuk berdiskusi mengenai alat kontrasepsi. Namun, pemerintah Jepang menyatakan bahwa topik

mengenai alat kontrasepsi sangat amoral sehingga peredaran majalah *Seito* dan buku yang berkaitan dengan alat kontrasepsi dilarang (Sapleton 2018, 233).

Menjelang akhir Perang Dunia II, rezim Showa (1926-1989) memanfaatkan ideologi kebangsaan untuk mempromosikan peran reproduktif perempuan. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menciptakan slogan “*gave birth and multiply for the nation*”. Di tahun 1940, sistem penghargaan bagi keluarga dengan banyak anak kemudian diperkenalkan. Perempuan didorong untuk melahirkan laki-laki demi kesejahteraan keluarga dan negara. Nilai seorang perempuan pada masa kepemimpinan Showa diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan dan membesarkan anak-anak yang taat pada kaisar dan ayahnya. Di sisi lain, perempuan yang belum menikah dianggap tidak subur dan kurang mencapai tingkat ‘ideal’. Stigma sosial juga memberatkan perempuan, dimana perempuan yang masih lajang tidak diperkenankan hadir dalam upacara pernikahan dan perempuan yang mandul harus meninggalkan acara karena dipercaya dapat mendatangkan kemandulan bagi tanah setempat. Meskipun demikian, proporsi perempuan yang menikah pada usia 50 tahun masih rendah pada era ini, yaitu sebesar kurang dari 2% (National Institute of Population and Social Security Research 2012b).

Setelah terjadinya mimikri budaya Barat dan internalisasi dengan nilai tradisional Jepang, perempuan Jepang dihadapkan dengan ambivalensi terkait keputusan rasional terkait pernikahan dan reproduksi. Perempuan semakin banyak menerima pendidikan liberal Barat dan tidak lagi berdasarkan *ryosai kenbo*. Di satu sisi, mereka tetap diharapkan untuk memenuhi peran domestik dan reproduktif, tetapi di sisi lain muncul kesempatan dan pilihan baru yang memungkinkan

beberapa perempuan menunda atau menolak pernikahan. Kondisi ambivalen ini turut berkontribusi pada fenomena *soushika*, yang berasal dari huruf kanji 少 (sedikit), 子 (anak), dan 化 (perubahan), yaitu kecenderungan untuk tidak menikah atau memiliki sedikit anak, yang menjadi salah satu indikator awal krisis kependudukan di Jepang modern (Widiandri 2016, 32).

Dalam beberapa dekade terakhir, Jepang menghadapi fenomena penurunan angka kelahiran yang memprihatinkan. Fenomena ini telah muncul sejak tahun 1975 dan dikenal dengan istilah *soushika*, yang berarti perubahan menuju jumlah anak yang sedikit. Pada periode 2015–2019, sekitar separuh dari 81 negara dengan tingkat fertilitas di bawah tingkat penggantian telah menerapkan kebijakan untuk mendorong peningkatan kelahiran (UN 2021). Selama tiga dekade terakhir, Jepang secara bertahap memperluas kebijakan keluarganya, mencapai tonggak penting melalui pengesahan Undang-Undang Dasar tentang Langkah-langkah Mengatasi Penurunan Angka Kelahiran (*Shōshika Shakai Taisaku Kihonhō*) pada tahun 2003. Namun, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini menunjukkan hasil yang beragam. Secara umum, kebijakan keluarga di Jepang tampak kurang berhasil dalam meningkatkan angka kelahiran: tingkat fertilitas total periode tetap rendah (1,30 pada 2021), angka kelahiran yang telah tercapai termasuk yang terendah di dunia, dan jumlah kelahiran hidup pada 2022 (diperkirakan 799 ribu) mencapai rekor terendah sepanjang sejarah (MHLW 2023b).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa krisis kependudukan di Jepang dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti tingginya biaya hidup dan biaya

membesarkan anak, ketidakpastian pasar kerja, perubahan struktur ekonomi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja, serta perubahan pola pernikahan dan keluarga. Namun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek ekonomi, demografi, dan kebijakan publik, sedangkan dimensi sosial dan budaya, khususnya pengaruh westernisasi terhadap perubahan nilai dalam masyarakat Jepang, masih relatif terbatas. Penelitian ini tidak memandang westernisasi sebagai penyebab tunggal krisis kependudukan, melainkan sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perubahan nilai sosial mengenai pernikahan, keluarga, dan reproduksi. Melalui perspektif Post Kolonialisme Homi K. Bhabha, penelitian ini menganalisis bagaimana interaksi antara nilai-nilai modern Barat dengan norma-norma tradisional Jepang melahirkan ambivalensi budaya yang memengaruhi cara sebagian perempuan Jepang memaknai pernikahan dan keputusan reproduksi. Ambivalensi tersebut kemudian dipahami sebagai salah satu mekanisme sosial-budaya yang berinteraksi dengan faktor ekonomi, politik, dan demografis dalam membentuk fenomena *shōshika*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai krisis kependudukan Jepang serta memberikan kontribusi bagi kajian hubungan internasional, studi budaya, dan analisis kebijakan kependudukan yang mempertimbangkan dimensi sosial, gender, dan budaya secara bersamaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian

“Bagaimana Westernisasi berkontribusi terhadap krisis kependudukan di Jepang melalui ambivalensi budaya antara nilai Jepang dan modernitas Barat dalam perspektif Post Kolonialisme?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kontribusi Westernisasi terhadap krisis kependudukan Jepang melalui ambivalensi budaya Jepang dan modernitas Barat dalam perspektif Post Kolonialisme dari Homi K. Bhabha yang memiliki variabel mimikri, ambivalensi, dan hibriditas.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung dan tidak langsung. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik dalam ranah akademis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian hubungan internasional dalam bidang social dan budaya, dengan menyoroti bagaimana pengaruh westernisasi terhadap krisis kependudukan Jepang dalam perspektif Post Kolonialisme Homi K. Bhabha, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam membaca fenomena demografis Jepang sebagai hasil dari proses hibridasi budaya dan internalisasi nilai-nilai modernitas Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis. Bagi pemerintah dan masyarakat Jepang, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan keluarga dan kependudukan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan budaya, termasuk fenomena tidak menikah dan tidak memiliki anak (*soushika*). Bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memahami pengalaman negara lain dalam menghadapi modernisasi dan westernisasi, sehingga bisa menjadi bahan perbandingan dalam perumusan kebijakan demografi dan program keluarga. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi bagi akademisi yang tertarik pada kajian Hubungan Internasional Jepang atau Asian Studies, khususnya dalam memahami interaksi antara transformasi budaya, modernisasi, dan krisis kependudukan, dengan perspektif Post Kolonialisme sebagai kerangka analisis. Penelitian juga bermanfaat untuk membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas kajian terkait pengaruh westernisasi terhadap nilai-nilai keluarga, peran gender, dan kebijakan sosial, sehingga dapat memperdalam pemahaman tentang fenomena *soushika* dan transformasi sosial di Jepang maupun negara lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini terdiri atas empat bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan fokus penelitian mengenai pengaruh westernisasi terhadap krisis kependudukan di Jepang dari perspektif Post Kolonialisme.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini memuat kajian pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis atau argumen utama, sekaligus menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengaruh westernisasi terhadap krisis kependudukan di Jepang dari perspektif Post Kolonialisme.

BAB III SENTUHAN DENGAN BARAT, NEO-KOLONIALISME, DAN KEHIDUPAN PEREMPUAN JEPANG

Bab ini membahas konteks historis dan sosial Jepang modern, mulai dari periode Tokugawa hingga Meiji yang memengaruhi kehidupan perempuan Jepang.

BAB IV WESTERNISASI JEPANG VIS A VIS KRISIS KEPENDUDUKAN DALAM PERSPEKTIF POST KOLONIALISME HOMI BHABHA

Bab ini mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana budaya Barat diinternalisasi, menciptakan ambivalensi, serta hibriditas budaya antara budaya Barat dan nilai-nilai tradisional Jepang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian, baik terkait pengembangan kajian akademik maupun implikasi praktis bagi kebijakan kependudukan dan transformasi sosial di Jepang.

